LAN RI 60 tahun
Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Erna Irawati S.Sos., M.Pol.Adm

Lembaga Administrasi Negara RI
Malang, 30 Agustus 2017

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

MaknaRB

1. Konsep Reform
2. Permasalahan Umum Birokrasi
3. Kebijakan Reformasi Birokrasi

1. Makna Reformasi Birokrasi
2. Agenda strategis RB;
3. Road map dan tantangan RB;
4. Desain rancangan rencana aksi RB;
5. Kontribusi OPD dlm Penyusunan Road Map

Konsep-konsep reformasi

re·form

bureaucratic reform

bureaucratic reform atau *administrative reform* ada lah merupakan dua hal yang sama

Birokrasi, dipandang sebagai sebuah komponen struktural atau institusional dari pemerintahan.

Ketika digunakan istilah birokrasi, maka sebenarnya istilah tersebut mencakup pula seluruh tindakan sebuah sistem yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif tetapi juga fungsi politik, ekonomi dan fungsi lainnya.

Sehingga tidak dapat dibedakan istilah *administrative reform* dengan *bureaucratic reform* atau antara birokrat dan administrator

Permasalahan umum Birokrasi

Organisasi gemuk, tumpang tindih fungsi, banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga

34 Kementerian
28 Lembaga Pemerintah Non Kementerian
115 Lembaga Non Struktural

Tingkat Jabatan	2011	2012	2013	2014
Struktural	192690	238462	277745	311 856
Eselon V	10036	3984	7297	10 206
Eselon IV	143362	166725	194782	220 193
Eselon III	33616	55501	61810	66 845
Eselon II	5240	11600	13194	14 002
Eselon I	436	652	662	610

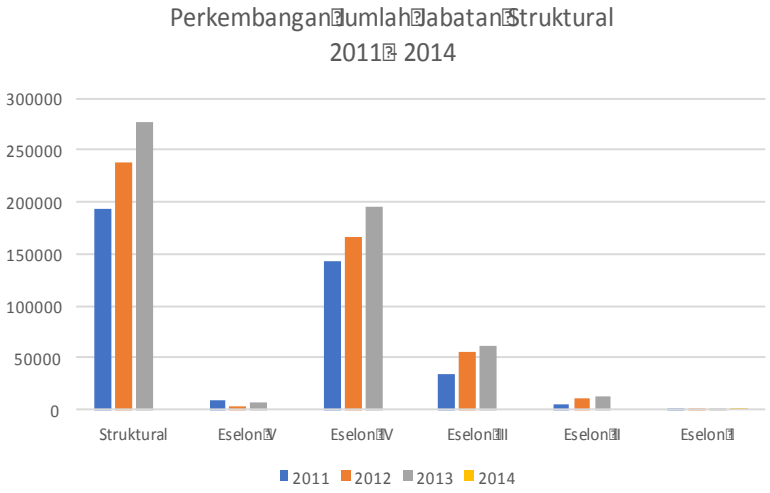

Sumber: BKN, 2015

Permasalahan umum Birokrasi

Jumlah Pegawai ASN: 4,375 juta
- Pusat : 889.500
- Daerah: 3.485.948 (BKN, Nov 2016)

Jumlah Penduduk**: 255 Juta**
(Proyeksi BPS tahun 2015)
Rasio Pegawai ASN: **1,71%**

Tingkat Pendidikan	2012	2013	2014
Sampai dengan SD	70531	60450	56 370
SLTP/Sederajat	108348	92626	88 255
SMA/Sederajat	1374851	1242045	1 202 945
Diploma I, II/Akta I, II	677992	585815	503 077
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	423299	412735	427 550
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	1812961	1969134	2 177 106
Jumlah	4467982	4362805	4 455 303

No	NEGARA	RASIO (%)
1	MYANMAR	0,7
2	CAMBODIA	1,2
3	**INDONESIA**	**1,71**
4	LAOS	1,8
5	THAILAND	1,9
6	VIETNAM	2,1
7	SINGAPORE	2,5
8	PHILIPPINES	2,9
9	MALAYSIA	3,7
10	BRUNEI	11,4

TALENT MATRIX ASSESSMENT PNS (BKN, 2016)

KOMPETENSI			
≥95	**VII 19.82%**	**III 12.21%**	**I 11.52%**
90-94	VIII 6.93%	IV 2.34%	II 1.95%
<90	IX 34.57%	VI 7.91%	V 2.73%
	<66	66-90	≥91
	POTENSI		

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

TALENT MATRIX ASSESSMENT JPT (BKN, 2016)

KOMPETENSI			
≥95	VII 5.44%	III 5.44%	I 8.84%
90-94	VIII 5.78%	IV 3.06%	II 2.72%
<90	IX 48.64%	VI 12.93%	V 7.14%
	<66	66-90	≥91
	POTENSI		

GAMBARAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

1. •JUMLAH BANYAK
2. •BERUMUR PENDEK
3. •TIDAK DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN BAIK
4. •TIDAK BERORIENTASI MELAYANI

Permasalahan umum Birokrasi

Terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai sendi penyelenggaraan pemerintahan

5.242 Keputusan Presiden
4.794 Peraturan Pemerintah
1.900 Undang-undang
1.766 Peraturan Presiden
387 Inpres
186 Perpu

Data Ditjen PP

Masing-masing Kementerian/ Lembaga mengeluarkan peraturan masing-masing

Kemenkeu : 2.346
Kemendagri : 658
Kemenhub : 628
dst

Masing-masing instansi pemerintah untuk memperkuat posisi kewenangannya melalui penetapan undang-undang;

Sulit dilakukan sinergi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;

Kecenderungan terjadi disharmoni dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan;

Seringkali tidak memperhatikan outcome dari kebijakan yang akan dikeluarkan;

Seringkali mengandung kepentingan-kepentingan yang tidak memihak pada publik dan dampak pada masa depan.

Proses perumusan yang tidak matang, sehingga diubah sebelum sepenuhnya dirasakan hasilnya.

REGULASI DI TINGKAT PUSAT (2000-2015)

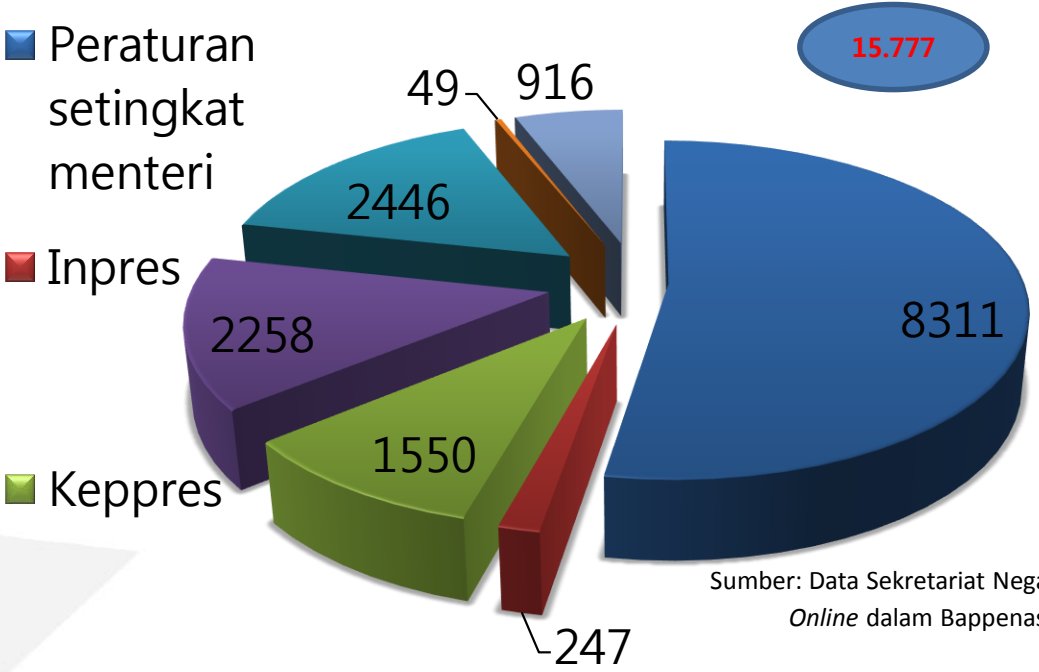

Sumber: Data Sekretariat Negara dan *Hukum Online* dalam Bappenas (2015)

KATEGORI KEBIJAKAN PER SEKTOR

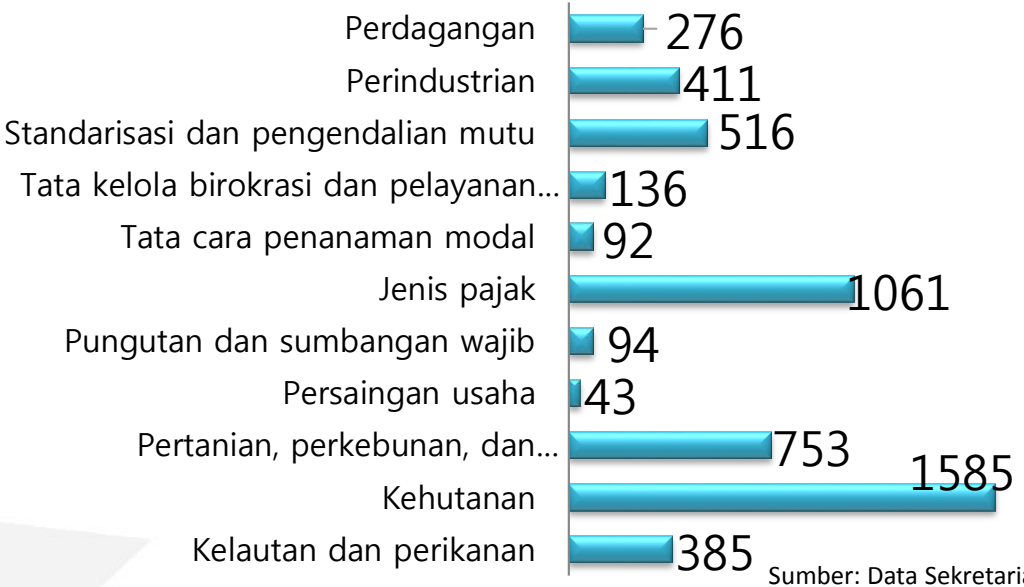

Sumber: Data Sekretariat Negara dan *Hukum Online* dalam Bappenas (2015)

KONDISI KEBIJAKAN DI INDONESIA

Konflik	Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya
Inkonsisten	Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya.
Multitafsir	Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas.
Tidak Operasional	Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

BERUMUR PENDEK

Produk Hukum	Isi	Diundangkan	Dibatalkan/ Direvisi	Usia
Perpres No. 19 /2016	Kenaikan Iuran BPJS untuk kelas III dari Rp 25.500 menjadi 30.000	1 Maret 2016	31 Maret 20 16	30 hari
Surat Menhub No. UM.3012/ 1/21/Phb/15	Pelarangan Go-Jek dan sejenisnya (Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek).	9 November 20 15	18 Des 2015	40 hari
Perpres No. 39 /2015	Pemberian Tunjangan Uang Muka Pembelian Kendaraan Perorangan untuk Anggota DPR, DPD, Hakim MA/MK, BPK, KY.	23 Maret 2015	6 April 2015	13 hari
Perpres No. 10 5 & 106 Tahun 2013	Pelayanan Kesehatan Paripurna & Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara	16 Des 2013	30 Des 2013	14 hari

TIDAK DIIMPELEMTASIKAN DENGAN BAIK

Pasal 134

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

*"Sampai dengan hari ini, UU No. 5/2014 tentang ASN sudah 3 tahun **lebih 3 bulan**, baru 1 PP (PP No. 11/2017 ttg Manajemen PNS) yang selesai"*

TIDAK BERORIENTASI MELAYANI

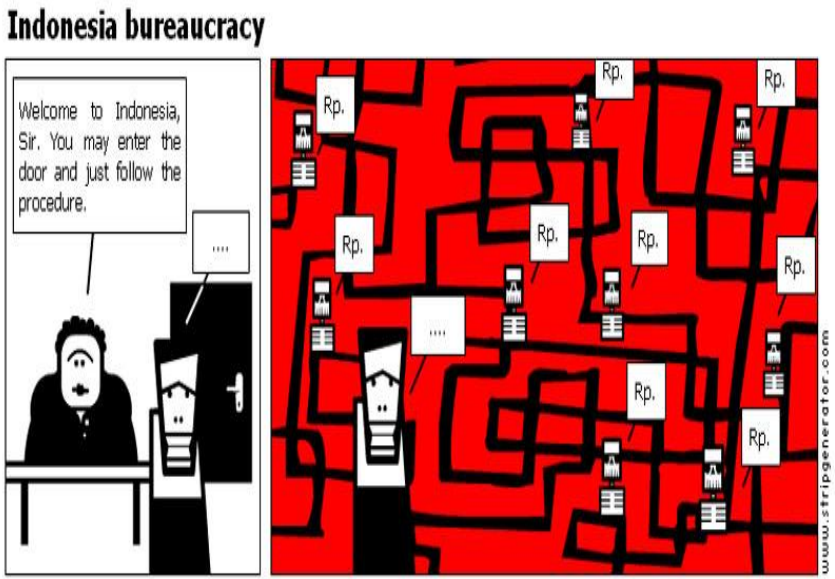

HOME ▸ NASIONAL ▸ POLITIK

3.000 Perda Bermasalah, Jokowi: Enggak Usah Dikaji, Cabut Saja

SABTU, 30 JANUARI 2016 | 06:11 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pres terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Jokowi menyampaikan jika dirinya terus mengikuti sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD. TEMPO/Aditia Noviansyah

PERDA/PERKADA DAN PERMENDAGRI YANG DIBATALKAN/REVISI
(sumber: Kemendagri 2016)

Dibatalkan/direvisi oleh Kemendagri:

Perda/Perkada Kab/Kota : 1765.

Permendagri : 111.

Dibatalkan/direvisi oleh Gubernur:

Perda/Perkada Kab/Kota: 1267.

Total 3143 Perda/Perkada dan Permendagri

REGULATORY GUILLOTINE

Teknik *The Guillotine Process* merupakan suatu proses penyederhanaan regulasi dengan cara (yang transparan) dalam menghitung serta mengkaji biaya administrasi dan politik berbagai regulasi.

	Target of Reforms	Before Cleanup	% Eliminated	% Simplified
Korea (11 months)	Regulations	11,125	48.8%	21.7%
Mexico (5 years)	Formalities	2,038	54.1%	51.2%
Moldova (16 weeks)	Regulations	1,130	44.5%	12.5%
	Fee-based Permits	400	68.0%	20.3%
Ukraine (12 weeks)	Regulations	15,000	46.7%	43.3%

Sumber : Jacobs (2006)

Permasalahan umum Birokrasi

Tata hubungan dalan internal instansi pemerintah maupun antar instansi pemerintah yang masih belum bersinergi

Penerapan teknologi informasi di pemerintahan masih bersifat parsial, belum terdapat integrasi sistem yang lebih efektif dan efisien

Penerapan sistem kearsipan yang masih lemah, sebagai bukti sejarah penyelenggara -an pemerintahan

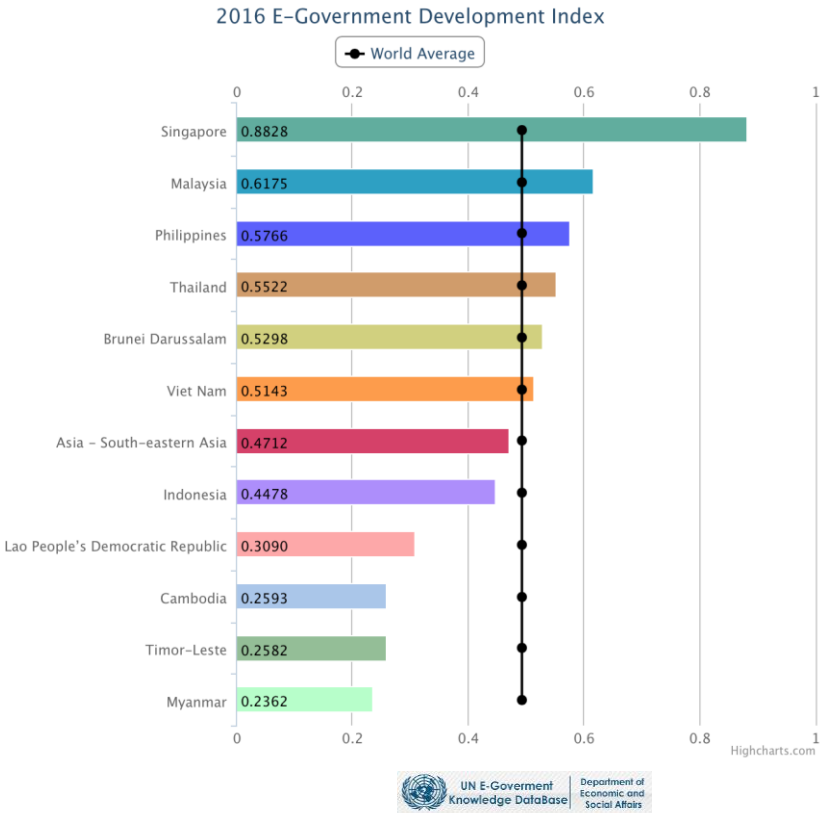

Permasalahan umum Birokrasi

Manajemen kinerja belum diterapkan secara konsisten di lingkungan pemerintahan

Instansi pemerintah belum sepenuhnya memberikan fokus pada upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil

Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari penerapan manajemen kinerja yang lemah adalah inefisiensi penggunaan anggaran

HASIL EVALUASI SAKIP K/L & PEMDA TAHUN 2015-2016

INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 (50 K/L, 24 PROV, 256 KAB/KOTA) BERPOTENSI TERJADI INEFISIENSI >30% DARI APBN/APBD DI LUAR BELANJA PEGAWAI

± 392,87 T

Skala nilai		Kementerian/ Lembaga		Pemerintah Provinsi		Kabupaten / Kota	
Kategori	Range Nilai	2015	2016	2015	2016	2015	2016
AA	90-100	0	0	0	0	0	0
A	80-90	4	4	2	3	1	2
BB	70-80	21	28	7	7	7	7
B	60-70	36	36	8	12	31	31
CC	50-60	16	11	13	10	174	172
C	30-50	0	3	3	2	239	239
D	0-30	0	0	1	0	14	14

Efisien

Inefisiensi

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran

INEFISIENSI TERJADI KARENA:

1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)
2. Ukuran kinerja tidak jelas
3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran
4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan

Permasalahan umum Birokrasi

Sistem pengawasan di lingkungan instansi pemerintah yang masih lemah.

Berbagai sistem yang dibentuk untuk mencegah penyimpangan, seperti Unit Pengendali Gratifikasi, LHKPN-LHKASN, whistle blowing system, dan lainnya, belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengelolaan keuangan belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan berbagai aturan pengelolaan keuangan.

Penerapan sistem pengendalian internal belum berjalan dengan baik di seluruh unit-unit kerja.

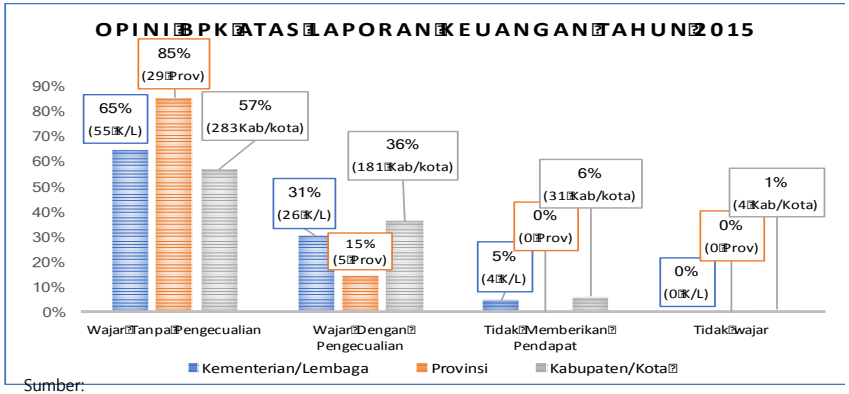

Sumber:
Laporan Pelaksanaan RB, 2016

Sumber:
Laporan Tahunan KPK, 2016

Permasalahan umum Birokrasi

Kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan masyarakat.

Pelayanan perijinan masih belum mampu memenuhi kriteria cepat, murah, adil, ramah, dapat dipercaya, jelas, transparan, bebas dari pungli dan memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Penggunaan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pelayanan, efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Perbandingan Ranking Ease of Doing Business Negara-negara ASEAN 2010 - 2017

Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indonesia	122	121	129	128	120	114	109	91
Malaysia	23	21	18	12	6	18	18	23
Singapura	1	1	1	1	1	1	1	2
Thailand	12	19	17	18	18	26	49	46
Vietnam	93	78	98	99	99	78	90	82
Filipina	144	148	136	138	108	95	103	99
Laos	167	171	165	163	159	148	134	139
Kamboja	145	147	138	133	137	135	127	131
Brunei	96	112	86	79	59	101	84	72

IFC International Finance Corporation

The most problematic factors for doing business

	Score
Corruption	11.7
Inefficient government bureaucracy	10.6
Inadequate supply of infrastructure	9.6
Policy instability	8.7
Access to financing	8.4
Tax rules	8.0
Inflation	7.1
Complexity of tax regulatoins	6.5
Poor work ethic in labor force	6.2
Foreign curency regulations	5.0
Government instability/coups	4.9
Crime and theft	4.6
Inadequately educated workforce	2.7
Insufficient capacity to innovate	2.5
Restrictive labr regulations	2.0
Poor public heath	1.3

Peringkat Daya Saing Global Negara ASEAN (WEF, 2016)

Negara	2014	2015	2016
Singapura	2	2	2
Malaysia	20	18	25
Thailand	31	32	34
Indonesia	34	37	41
Filipina	52	47	57
Vietnam	68	56	60
Laos	93	83	93
Kamboja	95	90	89
Myanmar	134	n/a	n/a
Brunei	n/a	n/a	58

Worldwide Governance Indicators : Government Effectiveness

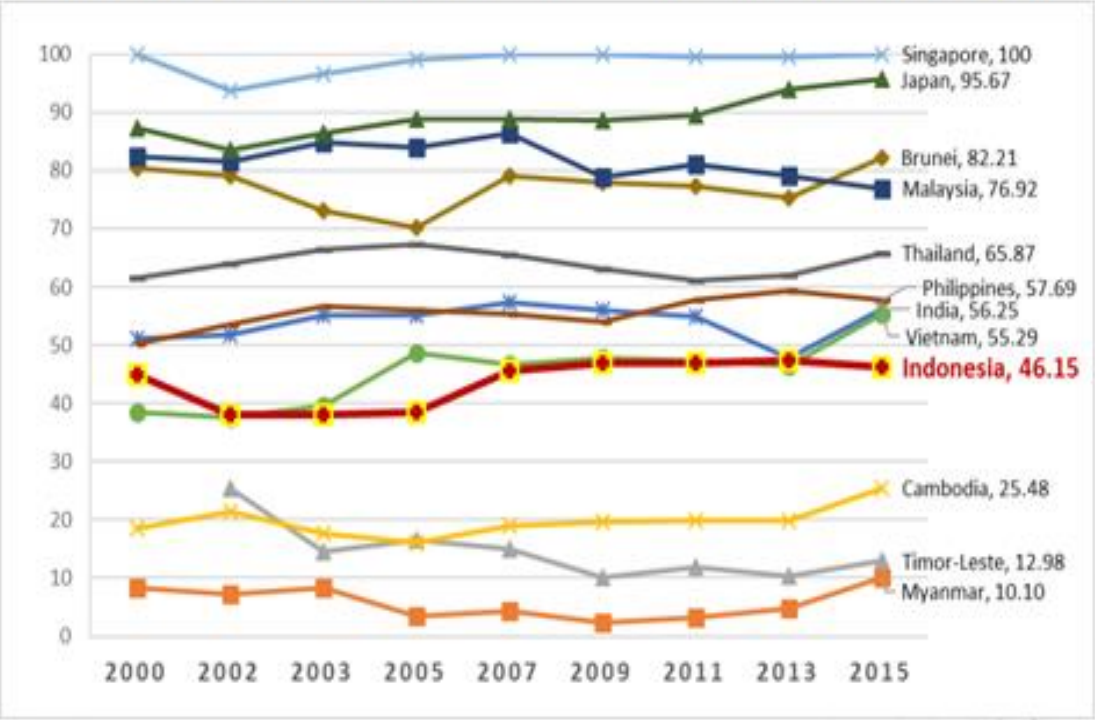

Sumber: Worldwide Governance Indicators 1996-2016 (www.govindicators.org) - The World Bank (IBRD, IDA) – edited data from www.databank.worldbank.org/data/download/WGI_excel.zip

Indeks Pembangunan Manusia 2014

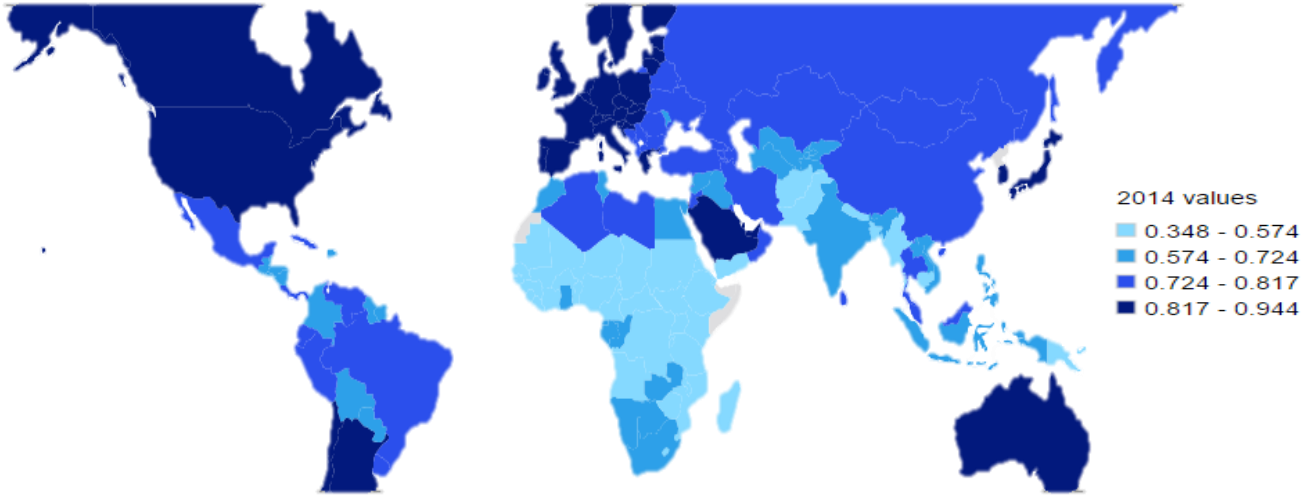

3 Dimensi IPM

1. Indeks harapan hidup
2. Indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan
3. Indeks standar hidup layak

Perbandingan IPM Beberapa Negara

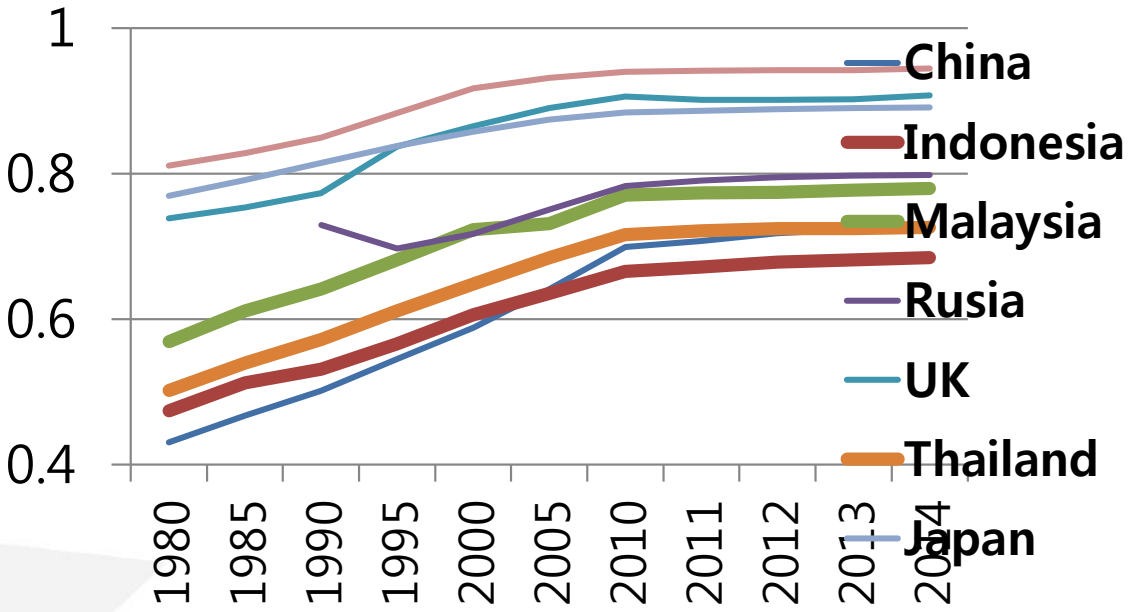

(UNDP, 2015)

Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 2005 – 2025

UU No. 17 Tahun 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panj ang Nasional
Tahun 2005 - 2025

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

TAHUN 2015 - 2019

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015
Rencana Pembangunan Jangka Menen gah Nasional
Tahun 20015 - 2019

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA

UU No. 5 Tahun 2014
Aparatur Sipil Negara

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2010

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 20 10
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 20 25

PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Peraturan Menteri PANRB
Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

UU No.30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

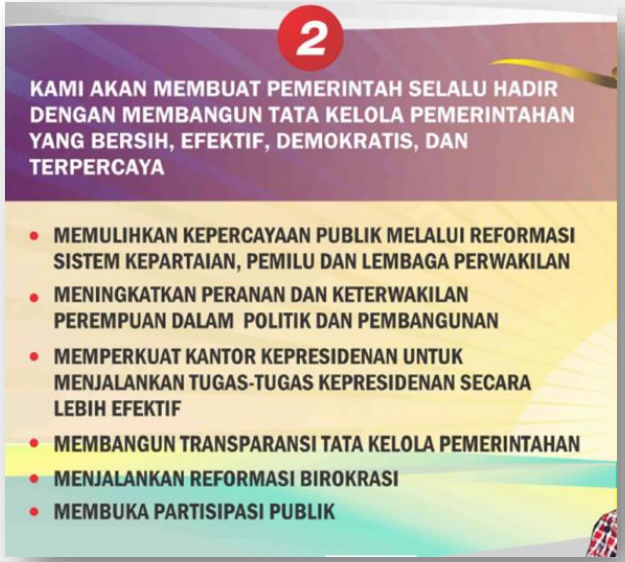

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
- Pendidikan
- Kesehatan
- Perumahan
- Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
- Antarkelompok Pendapatan
- Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU
- Kepastian dan Penegakan Hukum
- Keamanan dan Ketertiban
- Politik & Demokrasi
- Tata Kelola & Reformasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM

Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN	Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan

Sumber:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019

KEHADIRAN PEMERINTAHAN YANG BAIK MENJADI KUNCI KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Road Map Reformasi Birokrasi dan Tantangannya

1. Sasaran Reformasi Birokrasi
2. Ukuran Keberhasilan
3. Kemajuan

Sasaran Reformasi Birokrasi

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

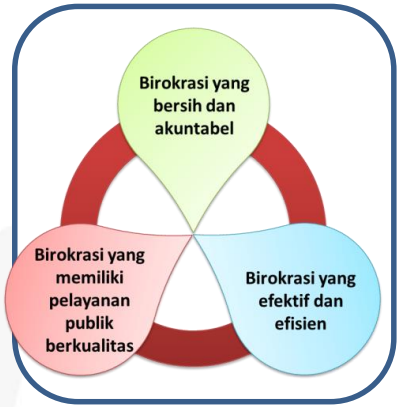

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014	SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Birokrasi yang efektif dan efisien
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Sasaran Reformasi Birokrasi

UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini WTP Atas Laporan Keuangan			
	a. K/L	%	74	95
	b. Provinsi	%	53	85
	c. Kabupaten	%	18	60
	d. Kota	%	33	65
	2. Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1 - 5	1	3
	3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1 - 5	1	3
	4. Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (Skor B Atas SAKIP)			
	a. K/L	%	39,3	85
	b. Provinsi	%	27,3	75
	c. Kabupaten/ Kota	%	30	50
	5. Penggunaan *e-Procurement* terhadap Belanja Pengadaan	%	30	80
Birokrasi yang efektif dan efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional			
	a. K/L	Skor 1 - 100	47	75
	b. Provinsi	Skor 1 - 100	NA	60
	c. Kabupaten/ Kota	Skor 1 - 100	NA	45
	2. Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1 - 100	76	86
	3. Indeks *e-Government* Nasional			
	a. K/L	Skor 0 - 4	2,66	
	b. Provinsi	Skor 0 - 4	2,2	3,4
	c. Kabupaten/ Kota	Skor 0 - 4	2,2	
Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas	1. Indeks Integritas Nasional			
	a. Integritas pelayanan Publik (Pusat)	Skor 0 - 10	7,22	9
	b. Integritas pelayanan Publik (Daerah)	Skor 0 - 10	6,82	8,5
	2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	80	95
	3. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)			
	a. K/L	%	K: 64; L:15	100
	b. Provinsi	%	50	100
	c. Kabupaten/ Kota	%	5	80

Kemajuan Perumusan RPP ASN

NO	RPP	STATUS	KETERANGAN
1	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) PNS	Telah diundangkan 17 September 2015 dengan PP No. 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bagi PNS	-
2	Manajemen PNS	PP No. 11 Tahun 2017	PP ini merupakan gabungan 11 PP amanat UU ASN terdiri dari 15 BAB dan 364 Pasal
3	Manajemen PPPK	Selesai Harmonisasi	Segera disampaikan ke Mensesneg
4	Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Selesai Harmonisasi	Segera disampaikan ke Mensesneg
5	Gaji dan Tunjangan	Selesai Harmonisasi	Segera disampaikan ke Mensesneg
6	Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Proses Harmonisasi	
7	Korps Pegawai ASN	Proses Pembahasan oleh Tim Kecil antar Kementerian/Lembaga	
8	Pensiun dan Tunjangan Hari Tua	Proses Pembahasan oleh Tim Kecil antar Kementerian/Lembaga	
9	Badan Pertimbangan ASN	Proses Pembahasan oleh Tim Kecil antar Kementerian/Lembaga	

Kemajuan

EFISIENSI BIROKRASI

e-Government

Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk sosial anggaran publik

Money Follow Program

Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil)

Fokus Kinerja bukan SPJ

ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ

Stop Pemborosan Anggaran

Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai

EFISIENSI

Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting

Anggaran digunakan hanya untuk membiayai **program/kegiatan prioritas** yang mendukung pencapaian tujuan Pembangunan

Anggaran yang digunakan menghasilkan **manfaat besar untuk masyarakat**

Kemajuan

EFISIENSI BIROKRASI

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara

- **UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**
- **UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

➢Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil
➢Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas k inerja pemerintah

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan a nggaran berorientasi pada hasil

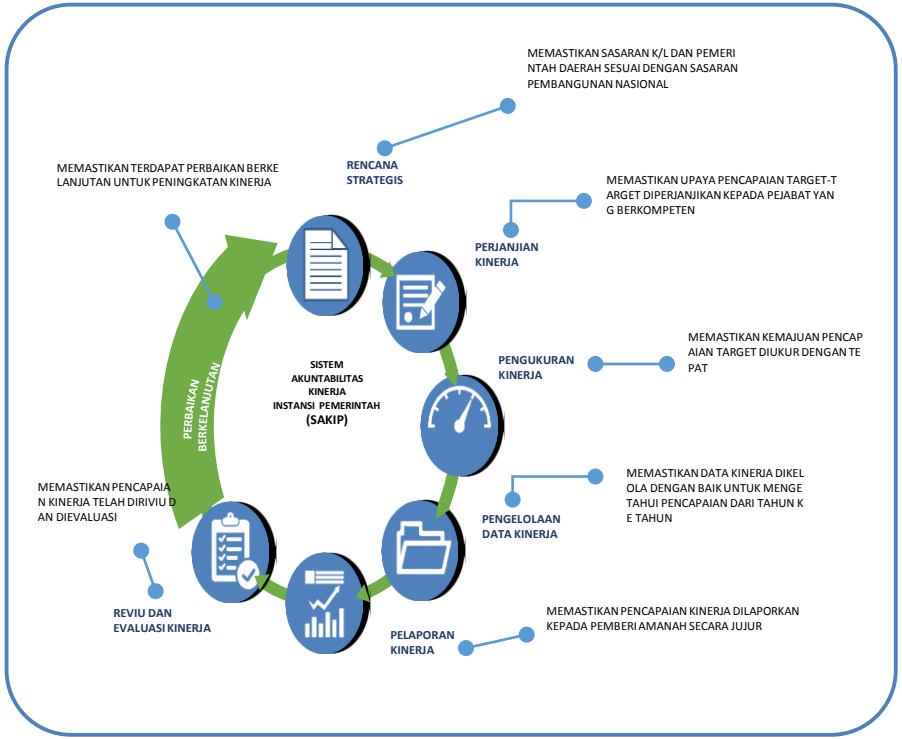

Kemajuan

EFISIENSI BIROKRASI

INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 (50K/L, 24 PROV, 456 KAB/KOTA) BERPOTENSI TERJADI INEFISIENSI > 30% DARI APBN/APBD DI LUAR BELANJA PEGAWAI

± 392,87 T

Skala nilai		Kementerian/ Lembaga		Pemerintah Provinsi		Kabupaten / Kota	
Kategori	Range Nilai	2015	2016	2015	2016	2015	2016
AA	90-100	0	0	0	0	0	0
A	80-90	4	4	2	3	1	2
BB	70-80	21	28	7	7	7	7
B	60-70	36	36	8	12	31	31
CC	50-60	16	11	13	10	174	172
C	30-50	0	3	3	2	239	239
D	0-30	0	0	1	0	14	14

Efisien

Inefisiensi

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran

INEFISIENSI TERJADI KARENA:

1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)
2. Ukuran kinerja tidak jelas
3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran
4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan

Kemajuan

Kelembagaan

Pembubaran 9 LNS (Perpres 116/2016)

1	Badan Benih Nasional
2	Badan Pengendali Bimbingan Masal
3	Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
4	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun
5	Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
6	Dewan Kelautan Indonesia
7	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)
8	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
9	Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

MENUNGGU PENETAPAN PERATURAN PRESIDEN

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Efisiensi Angaran (APBN)
25.347.000.000

Pengalihan
130 orang PNS
ke K/L terkait

Kemajuan

1.Tahun 2014 Menghasilkan 5 Finalis Dunia
2.Tahun 2015 Menghasilkan 5 Finalis Dunia
2 diantaranya mendapatkan posisi Runner Up yaitu :

- Inovasi "Layanan Kesehatan ibu
- Melahirkan dengan Bantuan
- Tenaga Kesehatan Tradisional
- (Dukun Beranak) Bekerjasama
- dengan Tenaga Medis" oleh
- Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
- Inovasi "Pelayanan Terpadu Penang gulangan Kemiskinan" oleh
- Pemerintah Kabupaten Sragen

Melaksanakan Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik

- Tahun 2014: 515 Inovasi
- Tahun 2015 : 1.189 Inovasi
- Tahun 2016 : 2.476 Inovasi

Langkah Kedepan

1. Percepatan Penerapan *e-Government,* antara lain: Percepatan Penerapan *e-Performance*
2. *Based Budgeting (e-Planning,e-Budgeting, e-Proc, e-Payment, e-Audit), e-Office,* dan *e-Services (Layanan secara Elektronik untuk semua Jenis Pelayanan)*
3. Penyederhanaan Lembaga Diklat ASN
4. Perampingan Jumlah LNS
5. Integrasi Data Kepegawaian di K/L/Pemda dengan BKN dan Kementerian PANRB
6. Membangun ASN sebagai Perekat NKRI, antara lain melalui: pengelolaan JPT Pratama dan JPT Madya secara Nasional, serta Penempatan Lulusan Sekolah Kedinasan Lintas Daerah
7. Implementasi Merit System untuk Mewujudkan SMART ASN 2019
8. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dapat Diakses oleh Masyarakat
9. Optimalisasi LAPOR! sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
10. Penetapan Kab/Kota Terpilih sebagai *Role Model* Pelayanan Publik
11. Replikasi Pelayanan Publik
12. *Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilukada serentak*

GERAKAN NASIONAL Revolusi Mental

Rencana Aksi Gerakan Indonesia Melayani

1. Peningkatan Kapasitas SDM ASN

- Meningkatnya ASN yang bersertifikasi profesi
- Meningkatnya SDM ASN yang sudah menduduki jabatan sesuai stankom
- Meningkatnya kompetensi ASN dlm yanlik

2. Peningkatan Penegakan Disiplin

- Menurunnya pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah (ASN dan TNI) dan Aparat Penegak Hukum (APH)

3. Penyempurnaan Standar Pelayanan E-Gov

- Meningkatnya K/L/D yang menerapkan standar pelayanan sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
- Meningkatnya sistem pelayanan yang inovatif (e-government)
- Meningkatnya K/L/D yang terintegrasi dengan Sis tem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPP)

GERAKAN NASIONAL Revolusi Mental

Rencana Aksi Ger akan Indonesia M elayani

4.Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja

- Meningkatnya K/L/D yang akuntabel
- Meningkatnya K/L/D yang nilai Reformasi Birokrasi Baik
- Meningkatnya penyelenggara negara yang menyempurnakan sistem man ajemen kinerja

5. **Peningkatan perilaku pelayanan**

- Meningkatnya integritas penyelenggara negara
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Meningkatnya pendidikan penyelenggara pelayanan publik untuk mendapatkan se rtifikat profesi di lingkungan Polri
- Meningkatnya penyelenggara pelayanan publik yang bersertifikat profesi di lingk ungan Polri

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

GERAKAN Revolusi NASIONAL Mental

Rencana Aksi Gerakan Indonesia Melayani

GERAKAN Revolusi NASIONAL Mental

6. **Deregulasi**
- Meningkatnya harmonisasi peraturan perun dang-undangan
- Meningkatnya Indeks Kualitas Kebijakan

7. **Debirokratisasi**
- Meningkatnya K/L/D yang telah menyederhanakan proses pelayanan birokrasi
- Meningkatnya Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menerapkan pembay aran non tunai (*cashless payment*)

8. **Peningkatan Penyediaan Sarpras**
- Meningkatnya sinergi sarana dan prasarana UPP termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus

9. **Peningkatan Penegakan Hukum dan Aturan di Bidang Pelayanan Publik**
- Meningkatnya kepatuhan dan penindakan terhadap pelaks anaan UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik

10. **Penerapan Sistem Penghargaan Dan Sanksi Beserta Keteladanan Pim pinan**
- Mengembangkan standar sistem penghargaan dan sanksi
- Meningkatnya K/L/D yang menerapkan sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan kepada penyelenggara negara

Meningkatkan Kapasitas SDM ASN

ewujudkan Profesionalisme ASN,
capai melalui :

1. Penetapan standar kompetensi jabatan, pola karier & bangrir
2. Sertifikasi kompetensi indv./ jabatan (Pemetaan kompetensi individu/JPT)
3. *Capacity Building* ASN
4. Diklat berbasis "gap" kompetensi
5. *Internship, coaching & counseling*
6. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi (>5 Thn)
7. Pengukuran kinerja individu & disiplin
8. Penguatan jabatan fungsional
9. Peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja

Program Peningkatan Penegakan Disiplin

Tahun	PELANGGARAN DISIPLIN																	
	PP 53 TAHUN 2010												PP 10 TAHUN 1983 jo PP 45 TAHUN 1990					Total
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Jml.	12	13	14	15	Jml	
2013	148	3	0	1	2	0	4	0	5	14	30	207	18	4	12	2	36	**243**
2014	102	1	1	3	1	1	4	0	4	6	20	143	12	2	4	6	24	**167**
2015	143	1	0	4	1	0	13	0	2	17	26	207	12	2	5	3	22	**229**
2016	KASUS NARKOBA PNS 207 ORANG (DIPENJARA)																	

Keterangan Pelanggaran Disiplin:

1. Tidak Masuk Kerja
2. Tipikor
3. Pidana Umum
4. Pemalsuan Dokumen
5. Penipuan
6. Ijazah Palsu
7. Narkotika
8. Pungutan Liar
9. Percaloan PNS
10. Perzinahan/Perselingkuhan
11. Lain-lain.

Keterangan Pelanggaran Disiplin:

12. Perkawinan kedua tanpa izin
13. Perceraian tanpa izin
14. Menjadi Isteri Kedua
15. Hidup Bersama Tanpa Menikah

Program Penyempurnaan Standar Pelayan
an E-Gov

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

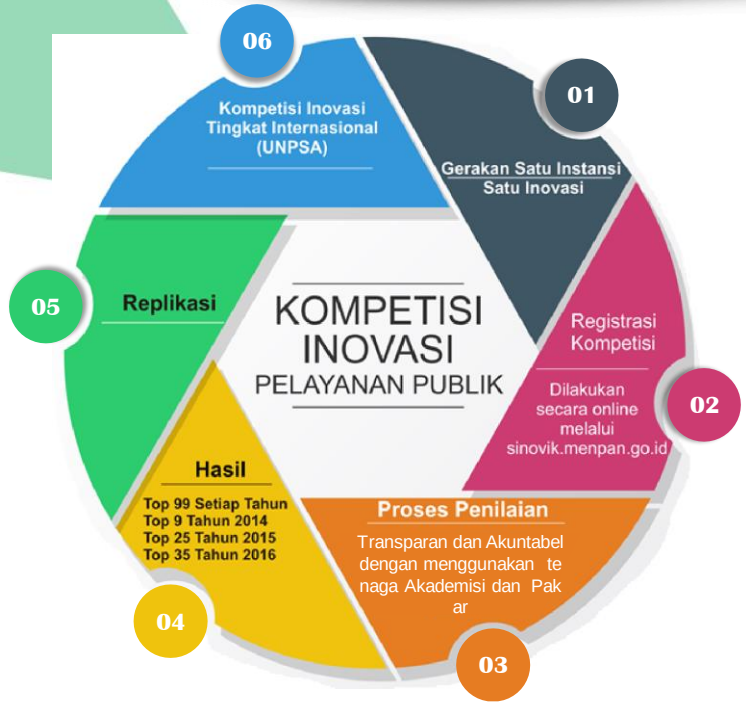

Perkembangan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017

- Diluncurkan oleh Menteri PANRB pada Tanggal 26 Oktober 2016 pada saat pembukaan Forum Nasional
- Replikasi Inovasi Pelayanan Publik
- 2016 di Bandung

- Tahap Registrasi Online sampai 10 Maret 2017

- Sudah Masuk sebanyak 3054 Inovasi.

Program Penyempurnaan Standar Pelayanan E-Gov

STANDAR PELAYANAN

1. **Tujuan**
   Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat

2. **Sasaran**
   Agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetap kan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten

3. **Komponen SP**

Service Delivery
1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prose dur
3. Jangka Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Manufacturing
1. Dasar Hukum
2. Sarana Dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawasan Internal
5. Jumlah Pelaksana Ja
6. minan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Program Penyempurnaan Standar Pelayanan E-Gov

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

- **Rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin.**

- Penerbitan PermenPANRB tentang pedoman penyelenggaraan Sistem informasi pelayanan publik nasional Di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara/daerah
- Pengembangan aplikasi dan database layanan publik

TARGET 2017:
- Instansi terintegrasi tahun 2017 → 100 Instansi K/L/D

PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Program Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja

Kondisi saat ini (Existing)

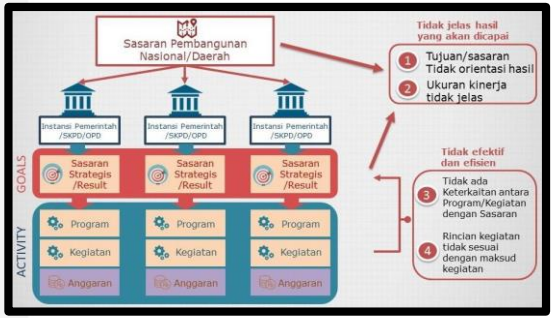

Penyempurnaan

Good Governance

Result Oriented Government

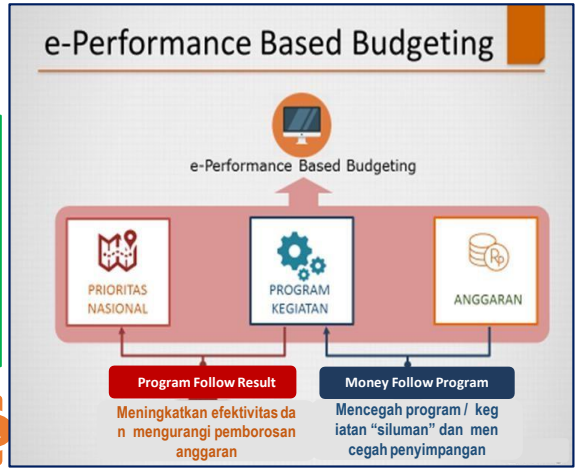

Clarity about objectives (Outcomes)	SASARAN TELAH BERORIENTASI HASIL	1
Information on results (performance indicators)	UKURAN KINERJA JELAS	2
Targets for results	PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN	3
Link between objectives and means	RINCIAN KEGIATAN SESUAI DENGAN MAKSUD KEGIATAN	4

Penyempurnaan Lanjutan

Terkait dengan Program 4 "Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja"

Program Peningkatan Perilaku Pelayanan

PENINGKATAN PERILAKU PELAYANAN

1

Indeks Integritas Organisasi

Indeks Integritas Organisasi adalah hasil s urvei yang menggambarkan keyakinan AS N atas kualitas penerapan integritas di ins tansi masing-masing.

2

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi merupakan hasil sur vei atas persepsi masyarakat pengguna laya nan mengenai perilaku koruptif pada instan si pemerintah atas dasar pengalaman mere ka menerima pelayanan instansi pemerinta h.

3

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang diinisiasi oleh KemenPANRB unt uk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan 6 aspek, yaitu:

Program Deregulasi

DEREGULASI

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

1. Pemetaan, revisi, dan harmonisasi terhadap peraturan perundangan-undangan yang tumpang tindih.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan

Indeks Kualitas Kebijakan

1. Sosialisasi dan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
2. Advokasi terhadap peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan

Program Debirokratisasi

DEBIROKRATISASI

PENGERTIAN

Proses Bisnis:

sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang tersedia.

Standar Operasional Prosedur:

Aktivitas kerja yang digambarkan secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis, rutin atau berulang-ulang

PROSES BISNIS

MAKSUD DAN TUJUAN

Agar setiap instansi pemerintah:

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal ma upun eksternal
3. Memiliki aset pengetahuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis
4. Mudah melihat potensi masalah dan potensi perbaikan
5. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Program Peningkatan Penyediaan Sarpras

Sinergi Sarana Dan Prasarana UPP Termasuk Kelompok Rentan Dan Berkebutuhan Khusus

- Pemetaan sarana dan prasarana UPP untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus
- Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan.
- Sinergi penyediaan sarana dan prasarana UPP untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khus us

Program Peningkatan Penegakan Hukum dan Aturan di Bidang Pel ayanan Publik

Survei Kepuasan Masyarakat

SKM

01 SASARAN

- Mengukur kepuasan masyarakat
- Mendorong peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik

02 TUJUAN

Untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

03 RUANG LINGKUP

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan Kompetens
6. i pelaksana Perilaku p
7. elaksana Maklumat pe
8. layanan Penanganan
9. pengaduan, saran dan masukan

04 HASIL SKM

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan unit penyelen ggara pelayanan
3. *Feedback* dalam memperbaiki pelayanan
4. Bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan
5. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Program Peningkatan Penegakan Hukum dan Aturan di Bidang Pelayanan Publik

Workflow process LAPOR-SP4N

Input Laporan
Semua Kanal Pengaduan baik maanual maupun e lektronik

Tindak lanjut Laporan
Telaah dan Klarifikasi Lanjutan, Penyaluran Pengaduan, Penyelesaian Pengaduan

Pemantauan & Evaluasi
Melakukan evaluasi atas penyelesaian pengauan dan men etapkan rekomend asi atas tindak lanj ut penyelesaian

Pelaporan
Tim Pemeriksa menyusun dan melaporkan hasil pe nyelesaian pengaduan kepada Pembina/Pen anggung Jawab melal ui Tim Koordinasi

LAPOR!-SP4N

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, sin kronisasi seluruh aplikasi pengaduan yang telah terbangun ke da lam aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Na sional (SP4N) untuk menangani berbagai jenis pengaduan pelaya nan publik.

Kanal pengelolaan pengaduan dan aspirasi rakyat online dengan prinsip *No Wrong Door Policy.*

3 Prinsip LAPOR! Sebagai SP4N.

1. Mudah;
2. Terpadu; dan
3. Tuntas.

Instansi terhubung LAPOR!-SP4N sampai dengan Desember 2016 sebanyak 161 Intansi :

- **Kementerian** 34
- **LPNK/ LNS** 48
- **LN** 4
- **Pemprov** 19
- **Pemkab** 42
- **Pemkot** 13
- **BUMN** 1

Berbagai Kerangka Hukum dan Kebijakan

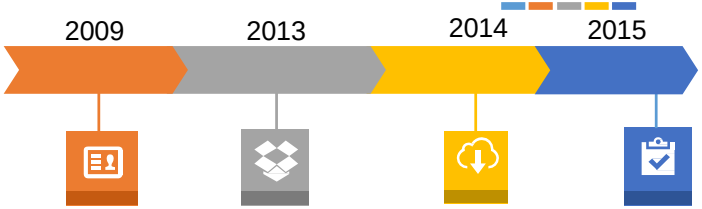

2009 — UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

2013 — PERPRES NO. 76/2013 TENTANG PENGELOL AAN PENGADUAN PE LAYANAN PUBLIK

2014 — PERMENPANRB NO. 24/2014 TENTANG PEDOMAN PENYE LENGGARAAN PENGELOLAA N PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK SECARA NASIONAL

2015 — PERMENPANRB NO. 3/2015 TENTANG ROADMAP PENGE MBANGAN SISTEM PENGEL OLAAN PENGADUAN PELAY ANAN PUBLIK NASIONAL

Program Peningkatan Penegakan Hukum dan Aturan di Bidang Pel ayanan Publik

Evaluasi Pelayanan Publik Pada Kementerian dan Lembaga

Dasar Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 7 Ayat (3)

Tujuan

1. Sebagai percontohan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah da lam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat

Aspek Evaluasi

1. Standar Pelayanan
2. Maklumat Pelayanan
3. Survei Kepuasan Masyarakat
4. Pengelolaan Pengaduan
5. Inovasi Pelayanan Publik
6. Sarana Prasarana

Instrumen Evaluasi

- Menggunakan Indeks Pelayanan Publik

Program Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi beserta Keteladanan Pemimpin

Keteladanan Pemimpin

rasional

strategik

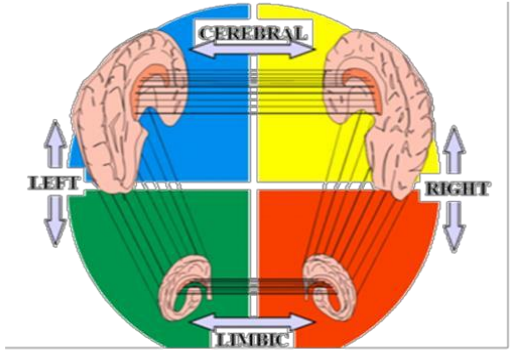

managerial

emosional

Model Berpikir

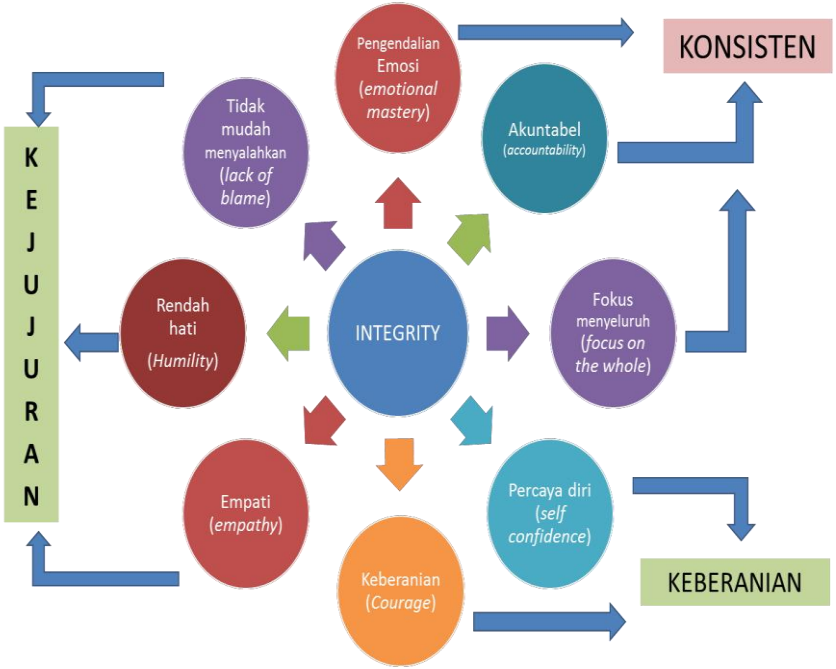

Apa dan mengapa Whole of Government (WOG)

Contoh – LAPOR!

PENGELOLAAN LAPOR! (KERJA SAMA KEMEN PANRB, KSP, DAN ORI)

PENGELOLAAN PENGADUAN

- Secara efektif LAPOR!-SP4N dioperasikan oleh KemenPANRB (Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KemenPANRB, KSP dan ORI tanggal 27 September 2016)
- Integrasi seluruh Provinsi/ Kab/Kota dengan LAPOR! Selambat-lambatnya akhir Oktober 2016.

Instansi Pemerintah yang Telah tergabung dalam LAPOR!-SP4N :

KEMENTERIAN	34
LEMBAGA NEGARA	4
LPNK	48
PERWAKILAN LN	131
PEMDA PROVINSI	14
PEMDA KOTA	3
PEMDA KABUPATEN	6
BUMN	23

AKSES LAPOR! MELALUI

www.lapor.go.id

SMS ke 1708

Twitter @LAPOR!1708

Apa dan mengapa Whole of Government (WOG)

Contoh – Kabupaten Banyuwangi (1)

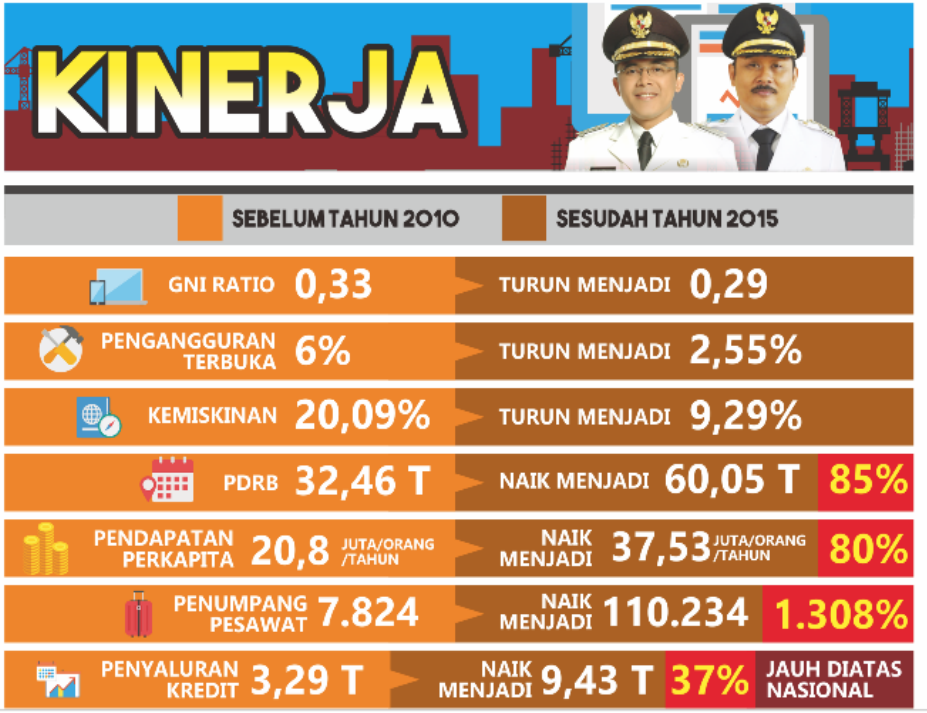

Apa dan mengapa Whole of Government (WOG)

Contoh – Kabupaten Banyuwangi (2)

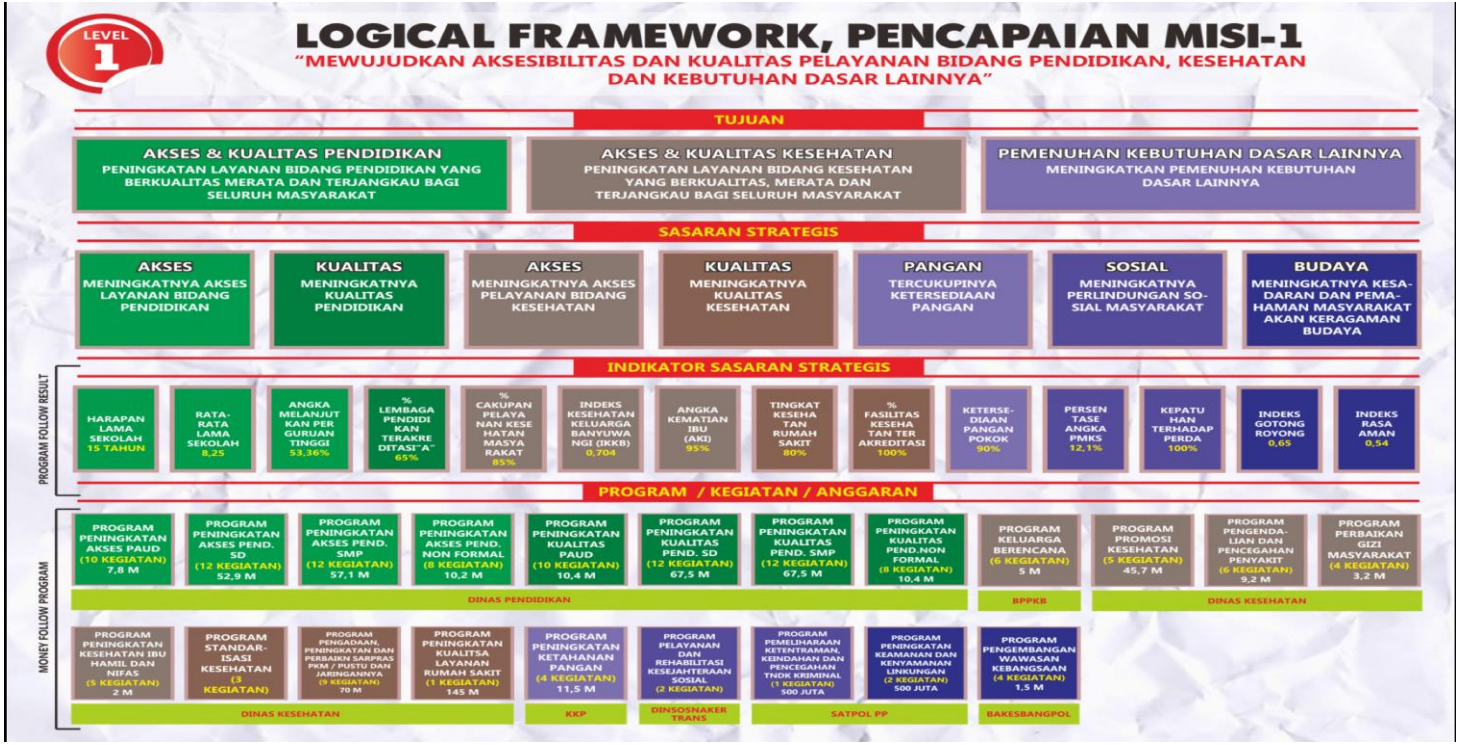

PENYUSUNAN ROAD MAP PEMERINTAH DAERAH

PRINSIP PENYUSUNAN ROAD MAP RB

Meneruskan dan Meningkatkan Langkah-langkah yang Sudah Baik

Menterjemahkan Prioritas Utama Pemerintah Baru

Memperkaya Dengan Isu-isu Strategis Baru

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Mengoperasionalkan RPJMN 2015 - 2019

Memperbaiki/ Menyempurnakan Strategi Implementasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Mikro
(pada masing-masing instansi pemerintah)

Langkah-langkah Umum Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

LANGKAH-LANGKAH

1. Persiapan
2. Identifikasi Kondisi Umum
3. Penentuan Fokus Perubahan
4. Penyusunan Rencana Aksi
5. Penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi

Outline Road Map Reformasi Birokrasi Pemda

	Ringkasan Eksekutif
	Berisi uraian singkat substansi Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kond isi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, Quick Wins, anggaran, rencana penghematan yan g diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.
Bab I	Pendahuluan
	Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokr asi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas mengurai isi dari Road Map reformasi birokrasi.
Bab II	**Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah**
	1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sas aran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kual itas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempu rnakan.

Outline Road Map RB Pemda

Bab II	**Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah**
	2. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
	3. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah **Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dal am rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.**
Bab III	**Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**
	1. Fokus perubahan Reformasi Birokrasi **2. Sasaran** **3. Kegiatan-kegiatan** **3. Rencana Aksi**
Bab IV	**Monitoring dan Evaluasi**
Bab V	**Penutup**

Persiapan

1. Bentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi – bentuk tim kecil yang menyiapkan penyusunan Road Map
2. Buat rencana penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
3. Mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan
4. Menyiapkan FGD dalam rangka identifikasi kondisi umum (menentukan waktu, tempat, fokus diskusi, dan peserta diskusi)
5. Menyiapkan Workshop dalam rangka penentuan fokus perubahan, penyusunan rencana aksi dan penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
6. Menyiapkan Tim yang bertugas untuk mendokumentasikan seluruh hasil diskusi dan workshop
7. Hal-hal lain yang perlu disiapkan.

Langkah-langkah umum

Identifikasi Kondisi Umum

↓

Fokus Perubahan

↓

mengidentifikasi kondisi saat ini, dilihat dari sasaran reformasi birokrasi, baik menyangkut hal-hal yang sudah dicapai/baik, hal-hal yang perlu diperbaiki dan harapan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu prioritas yang dipilih dari delapan area perubahan
2. Prioritas Pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah baik/maju, yaitu prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkat-kan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran;
3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan, yaitu prioritas yang ditujukan secara spesifik pada pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
5. Prioritas Perubahan Pada Satuan Perangkat Daerah, yaitu prioritas perubahan yang dilakukan pada satuan perangkat daerah.

Langkah-langkah Umum

Penyusunan Rencana Aksi

↓

Penyusunan Dokumen Road Map

rencana aksi reformasi birokrasi untuk seluruh prioritas

Penyusunan rencana aksi dilakukan dengan berbagai acuan sebagaimana telah ditetapkan dalam masing-masing area perubahan. (lihat pedoman-pedoman yang telah ditetapkan untuk memberikan arahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam fokus delapan area perubahan)

SIAPA YANG BERKONTRIBUSI DAN APA YANG DILAKUKAN DALAM PELAKSAAN RB?

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016

62,11 (B)	• INDEKS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MALANG
79,65	• INDEKS REFORMASI BIROKRASI PMPRB PEMERINTAH KOTA MALANG (*self assesment*)

SKOR RB KOTA MALANG (berdasarkan Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB)

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	2015		2016	
			Nilai Capaian	% Capaian	Nilai Capaian	% Capaian
A	Pengungkit					
1	Manajemen Perubahan	5.00	2,88	57.60%	2,90	58.00%
2	Penataan Peraturan Perundangan-undangan	5.00	1,66	33.20%	2,09	41.80%
3	**Penataan dan Penguatan Organisasi**	6.00	**2,49**	41.50%	**1,50**	25.00%
4	Penataan Tatalaksana	5.00	3,17	63.40%	3,43	68.60%
5	**Penataan Sistem Manajeman SDM**	15.00	**7,05**	47.00%	**7,06**	47.07%
6	Penguatan Akuntabilitas	6.00	3,33	55.50%	3,58	59.67%
7	Penguatan Pengawasan	12.00	4,89	40.75%	6,28	52.33%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	4,71	78.50%	4,95	82.50%
	Sub Total Komponen Pengungkit (A)	60.00	**30,18**	**50.30%**	**31,79**	52.98%
B	Hasil					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00			8,67	61.93%
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00			4,95	82.50%
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00			5,79	82.71%
4	Opini BPK	3,00			3	100%
5	Survei Ekternal Pelayanan Publik	10,00			7,91	79.10%
	Sub Total Komponen Hasil (B)	40,00			30,32	75.80%
	Indeks Reformasi Birokrasi (A + B)	100,00	**50,30**		**62,11**	62%

TOTAL NILAI TINGKAT PEMENUHAN PELAKSANAAN RB PADA 8 AREA PERUBAHAN (*self assessment*)

2015 — 58,55 — rentang skor kualitas **"KURANG"**

2016 — 63,07 — rentang skor kualitas **"CUKUP"**

No	Tingkat Pemenuhan	Rentang Skor Kualitas
1.	90 < s.d. ≤ 100	SANGAT BAIK
2.	75 < s.d. ≤ 90	BAIK
3.	60 < s.d. ≤ 75	CUKUP
4.	50 < s.d. ≤ 60	KURANG
5.	≤ 50	SANGAT KURANG

TOTAL NILAI TINGKAT PEMENUHAN PELAKSANAAN RB PADA 8 AREA PERUBAHAN (hasil evaluasi Kemenpan dan RB)

2015 — **50,30** — rentang skor kualitas **"KURANG"**

2016 — **62,11** — rentang skor kualitas **"CUKUP"**

No	Tingkat Pemenuhan	Rentang Skor Kualitas
1.	90 < s.d. ≤ 100	SANGAT BAIK
2.	75 < s.d. ≤ 90	BAIK
3.	60 < s.d. ≤ 75	CUKUP
4.	50 < s.d. ≤ 60	KURANG
5.	≤ 50	SANGAT KURANG

FOKUS PERBAIKAN Renaksi RB KOTA MALANG

8 AREA PERUBAHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI
4. PENATAAN TATALAKSANA
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
6. PENGUATAN AKUNTABILITAS
7. PENGUATAN PENGAWASAN
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

TIM RB

SELURUH OPD
- Quick WIN
- RENAKSI RB

No	Komponen Penilaian	SIAPA	AGENDA
A	Pengungkit		
I	Manajemen Perubahan	SEMUA SKPD DAN TIM RB	
2	Penataan Peraturan Perundangan-undangan	SEMUA SKPD DAN TIM RB	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	TIM RB	
4	Penataan Tatalaksana	SEMUA SKPD	
5	Penataan Sistem Manajeman SDM	SEMUA SKPD DAN TIM RB	
6	Penguatan Akuntabilitas	TIM RB	
7	Penguatan Pengawasan	TIM RB	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	SEMUA SKPD	
	Sub Total Komponen Pengungkit		
B	Hasil		
I	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	SEMUA SKPD	
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	SEMUA SKPD	
3	Kualitas Pelayanan Publik	SEMUA SKPD	
	Sub Total Komponen Hasil		
	Sub Total Komponen Pengungkit		

Keputusan KaLAN No. 8/K.1/HKM.03.2 tentang Tim RB LAN **(2015)**

SUSUNAN NAMA DAN JABATAN
TIM REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
TIM PENGARAH		
1	Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA	Ketua
2	Dr. Adi Suryanto, M.Si	Anggota
3	Sri Hadiati W.K., SH., MBA	Anggota
4	Dr. Muhammad Idris, M.Si	Anggota
5	Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA	Anggota
TIM PELAKSANA RB LAN		
1	Dr. Adi Suryanto, M.Si	Ketua tim RB
2	Drs. Anwar Sanusi, MPA., Ph.D	Wakil Ketua Tim RB
3	Dra. Elly Fatimah, M.Si	Sekretaris I Tim RB
4	Hartoto, S.IP., M.Si	Sekretaris II Tim RB

KELOMPOK KERJA SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA			
	1	Sudardi, SE., MM	Koordinator merangkap anggota
	2	Dra. Isti Heriyani, MBA	Sekretaris merangkap anggota
	3	Dra. Reni Suzana, MPPM	Anggota
	4	Abdullah Manshur, SE,. M.Sc	Anggota
	5	Awan Hari Murtiadi, SE	Anggota
	6	Yuliana Dwi Astuti, S.Sos	Anggota
KELOMPOK KERJA REGULASI, ORGANISASI, KETATALAKSANAAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI			
	1	Dra. Army Winarti, M.Si	Koordinator merangkap anggota
	2	Rusma Dwiyana, SH., M.Hum	Sekretaris merangkap anggota
	3	Budiarjo, S.Sos., MA	Anggota
	4	Triatmojo Sejati, M.Si	Anggota
	5	Eddi Wibowo, S.IP., M.Si	Anggota
	6	Dian Eka Rahayu Sawitri, SH., MH	Anggota

lanjutan..

KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			
	1	Dra. Etty Kurniasih, M.Si	Koordinator merangkap anggota
	2	M. Yusuf Gunawan, M.Si	Sekretaris merangkap anggota
	3	Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm	Anggota
	4	Pujiatmo Subarkah, SE., Ak., M.Sc	Anggota
	5	Dwi Ariany, S.Sos., M.Si	Anggota
	6	Meita Ahadiyati K, S.Si., MPP	Anggota
KELOMPOK KERJA INOVASI PELAYANAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI			
	1	Kania Damayanti, SE., MPP	Koordinator merangkap anggota
	2	Dra. Idha Saftawati, M.Ed.Mgnt	Sekretaris merangkap anggota
	3	Harnawan Ismunarto, S.Sos	Anggota
	4	Rudi Mastofani, ST., M.Kom	Anggota
	5	Bambang Suhartono, S.Sos., ME	Anggota
	6	Ir. Ari Noviono	Anggota
	7	Budi Prayitno, S.IP., M.Si	Anggota
	8	Agung Panji Bawono, ST	Anggota
	9	A. A. Sri Astiti, S.Kom., M.Sc	Anggota

lanjutan..

PENANGGUNGJAWAB REFORMASI BIROKRASI PADA PKP2A LAN DAN STIA LAN		
1	Dr. Joni Dawud, DEA	Penanggungjawab pada PKP2A I LAN
2	Dr. Muhammad Firdaus, MBA	Penanggungjawab pada PKP2A II LAN
3	Mariman Darto, SE., ME	Penanggungjawab pada PKP2A III LAN
4	Ir. Faizal Adriansyah, M.Si	Penanggungjawab pada PKP2A IV LAN
5	Dr. Makhdum Priyatno, MA	Penanggungjawab pada STIA LAN Jakarta
6	Prof. Dr. Dedi Mulyadi, M.Si	Penanggungjawab pada STIA LAN Bandung
7	Prof. Dr. Amir Imbaruddin	Penanggungjawab pada STIA LAN MAkassar
STAF SEKRETARIAT		
1	Lilis Komalasari, S.Si., ME	Koordinator
2	Widya Puspitaayu Sutisna, SE	Anggota
3	Aning Apriastuti, SE., Ak., SH	Anggota
4	Dwi Sulistyorini	Anggota

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 15 /K.1/HKM.03.1
TENTANG
AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tahun 2015

No	Nama	Unit Kerja
1.	Dr. Muhammad Taufiq, DEA.	Pusat Kajian Reformasi Administrasi
2.	Tri Atmojo Sejati, ST., SH., M.Si.	Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara
3.	Widhi Novianto, S.Sos., M.Si.	Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
4.	Erna Irawati, S.Sos., M.Pol. Adm.	Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
5.	Dra. Reni Suzana, MPPM.	Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat
6.	Dra. Army Winarti, M.Si.	Pusat Pembinaan Widyaiswara
7.	Dr. Andi Taufik, M.Si.	Pusat Diklat Teknis dan Fungsional
8.	M. Yusuf Gunawan Idris, S.Ip., ME	Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Negara
9.	Dr. Basseng, M.Ed.	Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
10.	Kania Damayanti, SE., MPP.	Pusat Inovasi Pelayanan Publik
11.	Drs. Haris Faozan, M.Si.	Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA
12.	Dr. Pangihutan Marpaung, M.Sc.	Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas
13.	Sudardi, SE., MM.	Biro Umum
14.	Dra. Elly Fatimah, M.Si.	Biro PH2P
15.	Dra. Etty Kurniasih, M.Si.	Inspektorat
16.	Dr. Joni Dawud, DEA.	PKP2A I LAN Bandung
17.	Dr. Muhammad Firdaus, MBA.	PKP2A II LAN Makassar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 15 /K.1/HKM.03.1
TENTANG
AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tahun 2015

18.	Mariman Darto, SE.,M.Si.	PKP2A III LAN Samarinda
19.	Ir. Faizal Adriansyah, M.Si	PKP2A IV LAN Aceh
20.	Dwi Ariany, S.Sos., M.Si.	STIA-LAN Jakarta
21.	Drs. Eris Yustiono, M.Sc.	STIA-LAN Bandung
22.	Prof. Amir Imbaruddin, MDA.Ph.D	STIA-LAN Makassar

TIM RB LAN
Keputusan KaLAN No. 3/K1/HKM02.2/2016

Tim Pengarah RB

Adi Suryanto
Sri Hadiati
Muhammad Idris
Triwidodo WU

Tim Pelaksana RB

Muhammad Taufiq
Erna Irawati
Elly Fatimah
Hartoto Sip MSi

Pokja SDM dan Pengembangan Budaya Kerja

Sudardi,
Isti Heriani,

Pokja Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pemantauan dan Evaluasi RB

Etty Kurniasih
Meita A Kartikaningsih,

Pokja Inovasi Pelayanan dan Teknologi Informasi

Baseng
Caca Syahroni

Pokja revolusi Mental dan Budaya Kerja

Haris Faozan
Yusuf Gunawan

Pokja Regulasi, Organisasi, Tatalaksana percepatan RB

Reni Suzana
Rusma Dwiyana

Pokja RB PKP2A dan STIA

Kepala PKP2A
STIA LAN

TERIMA KASIH

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110
www.lan.go.id

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI